

PLURALITAS DAN TANTANGANNYA

Oleh:
Mustafa P.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Rumusan, dan Batasan Masalah.

Di era kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih dimana informasi global sudah merambah sampai ke berbagai pelosok dunia, maka persentuhan dan hubungan kultural atau kebudayaan¹ sejagat (global) tidak bisa dihindari lagi. Umat manusia tidak lagi hanya dihadapkan kepada kebudayaannya sendiri secara terpisah dan berkembang secara otonomi, tanpa bersentuhan dengan kebudayaan bangsa lainnya.² Dalam kehidupan umat manusia, kebudayaan sangat penting. Kalau ikan tidak bisa hidup tanpa air, maka kehidupan umat manusia pun lambat laun akan punah tanpa kebudayaan. Lantaran itu eksistensi kebudayaan suatu bangsa perlu mendapatkan penghargaan dari bangsa lain sebagaimana ia menghargai kebudayaannya sendiri. Bahkan kalau dapat saling melengkapi antara budaya satu dengan budaya lainnya dalam arti tidak mengganggu substansi masing-masing kebudayaan yang beragam dan majemuk itu. Dengan demikian, kebudayaan berbagai bangsa akan dapat berkembang lebih dinamis dan lebih kreatif dalam tatanan kehidupan umat sejagat yang harmonis, di atas dasar nilai-nilai kemanusiaan universal. Hanya kebudayaan yang ditegakkan di atas dasar nilai-nilai kemanusiaan universal itulah yang akan mampu menghasilkan peradaban. Artinya kebudayaan yang beradab atau beretika dan bermoral, serta senantiasa memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan bangsa lain. Itulah salah satu makna dari kehidupan pluralitas budaya. Dalam kaitan ini Musa Asy'ari menulis bahwa pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri, yang tidak bisa dihindari apalagi ditolak³ Oleh karena itu, Kunto Wijoyo menolak penyeragaman kebudayaan⁴ karena akan menghilangkan identitas suatu bangsa. Menurut beliau dalam Islam sendiri dikenal zona-zona

¹ Bassam Tibi menulis bahwa, "Alfred Weber mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu bentuk ekspresional spiritual dan intelektual dalam substansi kehidupan, atau suatu sikap spiritual dan intelektual terhadap substansi kehidupan itu." Lihat Bassam Tibi, *Islam and The Cultural Accomodation of Social Change. Diterjemahkan dengan Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial* oleh Misbah Zulfah Elizabet dan Zaenul Abbas (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), h. 73.

² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta : Paramadina, 2004), h. 452.

³ Musa Asy 'ari, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berfikir* (Yogyakarta : LESFJ, 1999), h. 51.

⁴ Kunto Wijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung : Mizan, 2001), h. 198.

kebudayaan : “Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Turki, Iran, India, Timur Jauh, dan Asia Tenggara”.⁵

Dewasa ini di saat-saat tuntutan akan adanya kebutuhan yang mendesak tentang pentingnya menerima realitas kehidupan pluralitas, bangsa yang menganggap kebudayaannya lebih maju yaitu yang mendiami belahan dunia bagian barat dan utara, ingin memaksakan kebudayaannya kepada bangsa-bangsa yang masih terbelakang sebagai mana Franz Magnis-Suseno menulis sebagai berikut :

Kesatuan manusia bukan lagi sekedar cetusan hati para filsuf. Kesatuan itu, sudah mulai dipaksakan secara kasar oleh kerakusan kapitalisme, kolonialisme, sekarang merupakan realitas politis dan ekonomis yang dampaknya terasa sampai ke desa-desa paling terpencil negara-negara yang paling tradisional. Dampaknya mengubah hidup semua lapisan masyarakat di dunia, lebih atau kurang cepat, tidak hanya secara ekonomis, melainkan juga secara sosial budaya. Oleh karena itu ancaman terhadap harkat kemanusiaan tatanan masyarakat-masyarakat dunia sudah bersifat global.⁶

Faktor politik dan ekonomi adalah merupakan faktor terpenting yang mendorong dunia Barat untuk memanfaatkan segenap peluang yang ada untuk senantiasa melestarikan hegemoninya atas dunia Timur hingga dewasa ini. Dengan dasar kepentingan ekonomi dan politik inilah mereka berusaha untuk membangun kebudayaan dan peradaban dengan paradigma tunggal yaitu model kebudayaan dan peradaban barat yang dianggapnya lebih maju.

Konsep kebudayaan paradigma tunggal itu adalah bertentangan dengan konsep pluralitas yang mengakui eksistensi budaya setiap bangsa, ras, ataupun suku, karena seperti disebutkan di atas paradigma tunggal tersebut menghilangkan identitas suatu bangsa. Konsep seperti ini juga tidak sesuai dengan ajaran al-Qur`an.

Tuhan menegaskan dalam al-Quran surah Al-Hujurat (49) ayat 13 bahwa :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷

⁵ *Ibid.*, h. 200.

⁶ Franz Magnis – Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, (Yogyakarta : Pustaka, 1991), h. 91-91.

⁷ Departemen Agama, RI., *al-Quran dan Terjemah* (Jakarta, 1979), h. 847 Departemen Agama, RI., *al-Quran dan Terjemah* (Jakarta, 1979), h. 847.

Dalam ayat ini Tuhan menegaskan eksistensi setiap bangsa maupun suku. Artinya, Tuhan memang menciptakan manusia seperti itu, yakni berbeda-beda agar mereka dapat berkompetisi untuk meraih kemuliaan dan ketakwaan. Dengan begitu, secara antropologis Tuhan sendiri tidak menghendaki paradigma tunggal tersebut. Di sisi lain pun yaitu sudut pandang teologis Tuhan mengakui eksistensi agama yang bervariasi itu sebagaimana tergambar pada firman-Nya antara lain surah al-Baqarah (2) ayat 2, sebagai berikut :

Manusia itu adalah umat yang satu, (setelah timbul perselisihan) maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah perselisihan tentang Kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.⁸

Fazlurrahman menulis bahwa, keanekaragaman agama-agama walaupun semuanya sumbernya sama, namun ini merupakan persoalan teologis yang amat penting bagi Nabi Muhammad saw. Kenyataan sedemikian menghujam dalam hatinya dan menyedihkannya. Sehingga, sejak ia mendapatkan kesadaran ini hingga fase terakhir kehidupannya masalah ini tetap disinggung al-Quran pada berbagai level. Al-Quran menyatakan secara berulang kali bahwa agama-agama yang berbeda tidak hanya bertentangan tetapi setiap agama itu sendiri mengalami perpecahan di dalamnya.⁹

Selanjutnya menurut Fazlurrahman bahwa pada ayat-ayat Madinah, mengenai orang-orang Yahudi dan Kristen diakui sebagai “kaum-kaum” meskipun mereka masih diajak untuk masuk Islam¹⁰. Bahkan dalam surah al-Kafirun (109) ayat 6, Allah menegaskan : “Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”.¹¹ Artinya eksistensi mereka telah diakui.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pluralitas itu adalah merupakan sunnatullah. Akan tetapi mengapa umat manusia senantiasa ingin menyelahi sunnatullah tersebut?. Ini sama saja halnya bahwa sunnatullah adalah matahari

⁸ *Ibid.*, h. 51.

⁹ Fazlurrahman, *Major Themes of the Qur'an*. Diterjemahkan dengan *Tema-Tema Pokok al-Quran* oleh Anas Mahyudin (Bandung : Pustaka, 1996), h. 256.

¹⁰ *Ibid.* h. 327.

¹¹ Departemen Agama, RI., *Op Cit.*, h. 112.

terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kalau manusia menghendaki agar sebaliknya, maka itu adalah mustahil. Itu sunnatullah pada alam, akan tetapi sunnatullah pada manusia lain, artinya pada manusia dituntut memahami dan memberdayakan sunnatullah untuk meningkatkan Namun kalau sunnatullah itu dilanggar maka akan menimbulkan dampak yang merugikan dalam kehidupan umat manusia.

Sehubungan dengan pluralitas budaya, khususnya pluralitas agama, maka di era *post modernism* dewasa ini, adalah bersifat utopis jika suatu penganut agama tertentu mengklaim bahwa misinya atau dakwahnya akan dapat mengubah peta wilayah penganut agama dunia dan menjadikannya agama yang dianutnya saja sebagai satu-satunya agama yang bakal dianut oleh seluruh penduduk dunia. Jika memang demikian, maka “*shifting paradigm*” (perubahan paradigma) dalam pemikiran keagamaan perlu dirumuskan kembali sesuai dengan taraf perkembangan pemikiran dan pengalaman keberagaman manusia era *postmodernism*. Implikasinya ialah bahwa, agama-agama dalam konteks dunia global di era globalisasi budaya perlu memiliki strategi misi dan dakwah yang lebih dialogis, ramah, dan inklusif, sehingga dapat menyentuh persoalan-persoalan “kerohanian” dan “spiritualitas” manusia pada umumnya.¹²

Dari uraian di atas tergambar bahwa setidaknya ada empat faktor penting tantangan pluralitas yaitu: Hegomoni budaya, politik, ekonomi, dan teologi. Kalau keempat faktor tersebut tidak dicarikan solusinya, maka konsep pluralitas itu tidak terwujud dalam kehidupan yang konkrit, dan pada gilirannya nanti kehidupan pun akan punah. Dalam makalah ini akan dibahas tiga faktor saja, yakni mengapa hegomoni politik, ekonomi, dan agama bisa terjadi, yang merupakan tantangan terpenting dari pluralitas, serta bagaimana gambaran umum etika dakwah dalam kondisi seperti ini.

Pembahasan ini hanya dibatasi hanya pada :

1. Konsep pluralitas dan urgensinya dalam kehidupan kontemporer.
2. Faktor teologi, politik, dan ekonomi sebagai tantangan pluralitas.
3. Sekilas etika dakwah dalam kehidupan pluralitas.

B. Metode dan Pendekatan

Studi ini merupakan studi pustaka, dengan langkah pertama adalah mengumpulkan semua bahan pustaka yang ada. Selanjutnya mengadakan kerja bibliografi fungsional dengan mengidentifikasi segala data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian diklasifikasikan dan dicari hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah sistem yang akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas.

Metode analisisnya adalah analisis kualitatif fungsional dalam arti data itu dicermati tingkat validitasnya, kemudian dideskripsikan secara fungsional agar

¹² M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernism* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 111-112.

keseluruhannya bekerja sama mengarah kepada pemecahan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner. Namun, pendekatan intinya adalah pendekatan antropologis, humanis spiritual yaitu sebuah pendekatan yang memandang makhluk manusia sebagai makhluk yang di satu sisi adalah pluralistik, tetapi di sisi lain adalah sebagai makhluk spiritual yang memiliki persamaan yakni kepercayaan bahwa kebahagiaannya sampai di alam yang langgeng dan abadi adalah terkait dengan faktor transendent yang tidak terjangkau oleh akal manusia, namun ditentukan oleh sejauh mana manusia itu beramal salih dalam kehidupan yang nyata sehari-hari.

Dengan pendekatan ini akan dapat dilihat benang merah yang dapat menghubungkan keragaman yang bersifat partikular mengarah kepada suatu keharmonisan yang berbasis pada tujuan yang sifatnya universal dan sama di antara semua makhluk manusia yang meyakini selain adanya yang bersifat materil dan nyata sekaligus mempercayai sesuatu yang spiritual dan gaib.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Pluralitas dan Urgensinya dalam Kehidupan Kontemporer.

1. Konsep Pluralitas.

Lorens Bagus menjelaskan bahwa “konsep merupakan ungkapan pikiran atau ungkapan abstraksi – rohani tentang sesuatu keapaan (*whatness*), karena konsep menangkap suatu obyek, serta menyajikannya kembali apa adanya tanpa membuat suatu pernyataan tentangnya.”¹³

Dengan demikian konsep berarti ungkapan pikiran terhadap sesuatu obyek sebagaimana apa adanya obyek tersebut.

Pluralitas adalah paralel dengan kata *pluralisme* yang dalam bahasa Inggris menurut Encyclopedi Amerikana diartikan sebagai “*is the view that the world consist of many beings. It is generally contrasted with monism, in which all thing manifest just one substance or principle, and with dualism, in which they manifest just two*”¹⁴.

Pandangan ini adalah sesuai dengan realitas yang tampak dan fenomena yang ada karena memang kenyataannya realitas ini tidak tunggal melainkan berbilang atau plural. Misalnya saja, ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada bulan ada matahari, dan lain sebagainya.

Lorens Bagus mengemukakan beberapa gambaran tentang pluralisme yaitu : a) realitas tidak tersusun dari satu substansi yang unik atau salah satu dari jenis substansi, b) realitas dapat dipecahkan ke dalam sejumlah lingkungan yang berbeda yang sama sekali tidak dapat direduksikan kepada sesuatu kesatuan, c)

¹³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 482.

¹⁴ Encyclopedi Amerikana, vol. 22 (U.S.A., : t.p., 1992), h. 258.

pluralisme dalam bidang sosial, yaitu masyarakat dipandang sebagai tersusun dari berbagai ragam kelompok yang relatif independen dan organisasi yang mewakili bidang-bidang dan pekerjaan yang berbeda. Disini dituntut berlakunya semua nilai-nilai yang sungguh-sungguh manusiawi dalam pembangunan masyarakat, d) pluralisme modern yang cenderung ekstrim. Paham ini berpendapat bahwa semua kehidupan sosial hendaknya diatur semata-mata menurut sudut pandang dari kelompok-kelompok individualis. Dalam situasi seperti ini pembelaan khusus dari kelompok-kelompok tertentu dapat menjadi ancaman yang menghancurkan kesatuan negara atau membiarkan otoritas menjadi barang mainan. Ini dapat menjurus kepada penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas (diktator mayoritas). Selanjutnya, e) adalah pluralisme filosofis. Disini ada perbedaan pandangan secara mendasar berkaitan dengan prinsip-prinsip pertama, khususnya berkaitan dengan agama dan makna terdalam dari kehidupan manusia. Pada situasi ini dapat menimbulkan konflik-konflik yang mendalam, khususnya dalam bidang-bidang di mana suatu sistem nilai yang umum harus diandaikan supaya sampai pada tindakan sosial dan politik yang umum dan konkrit dalam suatu masyarakat tertentu. Terakhir, f) adalah pluralisme yang berupaya membenarkan keberagaman filsafat, dengan menegaskan bahwa semua kebenaran bersifat relatif, dan yang menganggap bahwa semua keyakinan filosofis dan religius dalam pengertian relativisme murni, sebagai pendapat-pendapat pribadi yang semuanya mempunyai nilai yang sama.¹⁵

Dari gambaran yang dikemukakan oleh Lorens Bagus terlihat bahwa konsep tentang pluralitas itu sendiri juga tidak tunggal. Untuk menetapkan rumusan yang paling tepat tentang konsep plural, perlu ada acuan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Disitulah letak pentingnya pendekatan etis-humanis-spiritual. Nilai baik-buruk, meskipun dalam sistem kebudayaan bagi suku atau bangsa tertentu terkadang ada perbedaan, akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada nilai yang berlaku universal. Kejujuran misalnya adalah sesuatu yang bernilai baik. Demikian pula berlaku adil. Semua orang sepakat bahwa berlaku jujur serta berbuat adil adalah baik, dan kebalikannya adalah tidak baik. Oleh karena itu konsep pluralitas memiliki dua sisi yaitu, wilayah universal-absolut, dan sisi lain adalah wilayah partikular-relatif. Wilayah universal-absolut (mutlak) adalah nilai-nilai yang menurut akal manusia adalah baik secara obyektif seperti contoh tersebut di atas. Sedangkan nilai-nilai yang bersifat partikular-relatif dapat dicontohkan misalnya cahaya terang pada dasarnya adalah baik, tetapi bagi orang sakit mata, terkadang dianggap tidak baik. Gula pada dasarnya adalah baik, tetapi bagi orang sakit gula, ternyata tidak baik karena dapat memperparah penyakitnya. Dengan begitu, konsep pluralitas yang agak ideal adalah yang menghargai keragaman yang sifat partikular-relatif dari setiap budaya di satu sisi dan di sisi lain semua sistem budaya di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa sejangat (secara

¹⁵ Lorens Bagus, *Op Cit.*, h, 854 – 855.

global) tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bahkan tidak terbatas nilai kemanusiaan universal saja, tetapi juga pada nilai-nilai makhlukiah secara universal. Artinya keragaman hayati, nabati, dan makhluk-makhluk lainnya harus dihargai eksistensinya, sehingga ekosistem yang disana tergantung kehidupan umat manusia tidak terganggu. Karena itu menurut M. Quraish, manusia tidak bisa bersikap sebagai penguasa terhadap alam ini¹⁶, akan tetapi seyogyanya manusia bersikap sebagai pemelihara, sehingga walaupun alam ini diolah oleh manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, tetapi kelestarian lingkungan hidup tetap terpelihara. Tidak terbatas pada wilayah fisik saja, seperti telah disinggung di atas, akan tetapi keragaman itu termasuk wilayah-wilayah sistem pemikiran serta sistem kepercayaan yang dianut oleh umat manusia. Pada wilayah pemikiran, produknya adalah relatif sedangkan sistem kepercayaan khususnya agama-agama wahyu selain memiliki aspek relatif, ia memiliki aspek absolut dan sakral. Pada aspek yang absolut yakni akidah sikap yang diambil menurut M. Quraish Shihab adalah komitmen yang kuat dan tegas, tetapi ia sifatnya ke dalam diri saja, tidak bisa di mutlakkan kepada orang lain, apalagi yang berbeda akidah. Artinya tetap menghargai akidah orang lain, tetapi tidak mengorbankan akidah sendiri.¹⁷ Telah disinggung pada bagian pendahuluan bahwa, sejak semula memang Allah SWT. menghendaki pluralitas. Paling tidak pada penciptaan alam ini senantiasa ada pasangan-pasangan. Ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada baik ada buruk, dan seterusnya.

Gambaran tentang kosep pluralitas menurut al-Qur`an dapat dilihat antara lain pada firman Allah surah al-M idah (5) ayat 48, yakni:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung : Mizan, 1999), h. 269 – 271.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung : Mizan, 1998), h. 221.

Terjemahannya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat manusia di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu kembali semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.¹⁸

Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat ini sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid bahwa, al-Qur`an diturunkan kepada umat manusia adalah untuk mendukung dan melindungi kebenaran kitab-kitab suci yang telah ada sebelumnya, khususnya bagian-bagian yang jelas tidak dihapus oleh kitab suci al-Qur`an. Dan yang dimaksud bahwa al-Qur`an menjadi “saksi” (*muhaimin*) untuk kitab-kitab suci terdahulu ialah bahwa al-Qur`an menjadi hakim yang dapat dipercaya, dalam arti mempertahankan hukum-hukumnya yang belum dihapus al-Qur`an membenarkan isinya yang belum diganti oleh Allah. Dan boleh jadi jalan (*syir`ah*) atau metode (*manhaj*) kitab-kitab yang lama tidak sama dengan jalan dan metode al-Qur`an, namun hal itu terjadi hanyalah karena tuntutan khusus ruang dan waktu, jadi tidak mengganggu dan tidak pula mengurangi keabsahan ajaran yang dibawanya.¹⁹

Pandangan Ibnu Taimiyyah ini adalah pandangan yang bersikap inklusif. Pandangan ini lebih diperjelas lagi oleh Rasyid Rida seperti dikutip oleh al-Hakim dan terakhir dikutip oleh Nurcholis Madjid bahwa, “*Ahl al-Kitab* tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi dan Kristen serta kaum Majusi (pengikut Zoroaster), tetapi juga mencakup agama-agama lain yang mempunyai suatu bentuk kitab suci”²⁰

M. Quraish Shihab pada akhir penjelasannya ketika menafsirkan surah al-M idah ayat 48 tersebut mengemukakan bahwa walaupun ayat-ayat ini menyatakan kehendak Allah untuk terjadinya pluralitas dalam kehidupan umat manusia, “namun bukannya menafikan kehendak Allah menjadikan manusia satu, dalam arti satu

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 168

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Misi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 142-143

²⁰ *Ibid.* h. 145.

keturunan atau asal-usul". Manusia itu plural dari segi suku, bangsa, dan lain-lain, namun yang termulia adalah yang paling takwa (Al-Hujurat (49): 13).²¹

Masih banyak ayat-ayat lain yang berhubungan dengan konsep pluralitas menurut al-Qur`an, namun tidak akan dikemukakan di sini, sebab apa yang telah diungkapkan sudah memberikan gambaran umum tentang konsep pluralitas menurut al-Qur`an.

Dalam kaitannya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama, tertanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H (28 Juli 2005), yang telah mengharamkan umat Islam antara lain mengikuti paham pluralisme, mewajibkan bersifat eksklusif dalam hal akidah dan ibadah, serta membolehkan bersifat inklusif pada masalah sosial yang tidak terkait dengan akidah dan ibadah,²² adalah dapat diberikan tinjauan dalam uraian berikut ini.

Berdasarkan pengertian pluralitas yang telah diuraikan di muka khusus dalam hal pluralitas agama, telah dijelaskan bahwa, dalam akidah tentunya termasuk ibadah –karena ibadah adalah aplikasi akidah– maka harus bersikap tegas dengan prinsip bahwa “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku”. Dari segi akidah, agama-agama itu tidak sama. Karena tidak sama maka dikatakan ada kemajemukan atau pluralitas. Itulah makna plural dalam soal akidah dan ibadah. Karena itu dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dalam hal ini berpegang pada prinsip *agree and disagreement*. Dengan begitu fatwa MUI tersebut sesungguhnya salah kaprah sebab ia memberikan pemahaman yang terhadap pluralitas tersebut.

2. Urgensi Sikap Pluralistis dalam Kehidupan Kontemporer

Kesadaran tentang adanya konsep pluralitas sudah dimulai sejak masa filsafat Yunani kuno, tergambar pada pandangan Anaxagoras dan Empedokles. Anaxagoras memandang bahwa jumlah substansi-substansi yang berbeda secara kualitatif adalah tak terbatas. Empedokles berpendapat bahwa pada realitas ini hanya ada 4 substansi yaitu tanah, udara, api, dan air. Pada zaman modern, William James menjelaskan pluralisme dalam konteks dominasi relasi-relasi dunia²³. Akan tetapi nampaknya tuntutan akan pentingnya konsep pluralitas untuk lebih diberikan apresiasi dan diterapkan adalah ketika dunia ini memasuki era baru yang disebut dengan era Postmodernisme.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur`an*. Vol. 3 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 116.

²² MUI, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 7 Agustus 2005), h. 58-66.

²³ Lorens Bagus, *Op Cit.*, h. 853 – 854.

M. Amin Abdullah menulis ada tiga ciri dasar pemikiran postmodernisme yang disebut sebagai struktur fundamental pemikiran postmodernisme. *Pertama, deconstructionism*, yang berarti mempertanyakan ulang (membongkar) teori-teori ilmiah yang sudah “mapan” atau “standar” yang dibangun oleh pola pikir “modernisme”, untuk kemudian disusun kembali teori yang lebih relevan untuk memahami kenyataan masyarakat, realitas keberagamaan dan realitas alam yang berkembang saat ini. *Kedua, relativism*, adalah memiliki alur pikir bahwa wilayah bahasa, budaya, cara berpikir dan agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat kebiasaan budaya masing-masing sehingga sulit untuk ditarik garis lurus yang dapat menyamaratakan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitan dengan pemikiran Islam, Amin Abdullah mengemukakan pandangan Seyyed Hossein yang menyatakan bahwa tidak ada “relativisme yang absolut” sebab hal itu akan menghilangkan “normativitas” ajaran agama, tetapi juga tidak ada pengertian “absolut” yang sebenar-benarnya absolut, selagi nilai-nilai yang absolut itu *dikurung* oleh historisitas kemanusiaan itu sendiri. Karena itu nilai-nilai agama itu bersifat “*relatively absolut*”. *Ketiga, pluralisme* adalah akumulasi model berpikir *deconstructionism* dan *relativism*. Alur berfikir ini menyatakan bahwa di era ini sangat sulit untuk mempertahankan “paradigma tunggal” dalam dirkussus apapun,²⁴ khususnya dalam bidang agama.

Berikut ini akan ditinjau mengapa dikatakan bahwa alur berfikir pluralitas seperti diuraikan di atas adalah sangat penting di era kontemporer.

Ada dua kata-kata kunci yang akan dijadikan sebagai dasar kajian yaitu globalisasi budaya dan etis-humanis spiritual.

Ada dua kekuatan yang mewarnai perjalanan hidup manusia sepanjang zaman yaitu akal dan wahyu yang terkadang terjadi ketegangan antara kedua kekuatan tersebut. Bahkan saling menegasikan satu sama lain. Sejak zaman Yunani kuno sampai meninggalnya Aristoteles, Akal pikiran sangat dominan dalam menyusun tatanan kehidupan yang berperadaban. Namun, dalam perjalanan sejarah yang panjang ini dunia barat pernah mengalami kehidupan yang suram ketika akal pikiran dipasung oleh wahyu. Artinya mereka berpegang kepada paradigma tunggal, hanya informasi dari wahyu semata yang dianggap benar, dengan menegasikan kebenaran yang ditemukan oleh pikiran manusia. Mereka pahami wahyu secara literal-tekstual dan minus penalaran kontekstual. Tetapi ketika dunia barat melalui era renaissance dan pencerahan, dan seterusnya, ternyata lagi-lagi dalam perkembangan selanjutnya muncul pandangan yang sangat ekstrim yang sama sekali menapikan kebenaran wahyu, dan satu-satunya kebenaran yang dapat diterima adalah kebenaran yang bersumber dari akal pikiran semata, dalam arti yang bersumber dari fakta-fakta yang empiris semata dan kemudian menjadi sebuah aliran dalam filsafat yakni aliran positivisme yang tokoh utamanya adalah Aguste Comte. Paham inipun juga berpegang kepada paradigma tunggal yakni bahwa

²⁴ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 99 – 104.

sumber kebenaran hanyalah dari akal yang didasarkan pengalaman inderawi semata.²⁵ Walaupun alur berpikir ini telah mampu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih di dunia barat khususnya seperti disaksikan sekarang ini, tetapi dari hasil teknologi yang telah menghasilkan Perang Dunia Pertama dan ke dua, dan terakhir peristiwa WTC, adalah menunjukkan bahwa paradigma tunggal khususnya dalam wilayah akal pikiran dalam merumuskan kebenaran teori-teori ilmiah tidak bisa dipertahankan lagi. Itulah yang mengilhami munculnya alur pemikiran *post modernisme*, sebagaimana disinggung di atas.

Dalam dunia Islam, sebelum kebudayaan khususnya filsafat Yunani masuk ke dunia Islam, dari sejak semula al – Qur’an sangat menghargai akal pikiran, bahkan al – Qur’an menggambarkan bahwa orang yang tidak menggunakan akalnya adalah lebih bodoh daripada binatang.²⁶ Karena itu dalam Islam paradigma tunggal itu tidak ada. Akal dan wahyu keduanya saling membutuhkan, dan saling melengkapi.²⁷ Ketika akal tidak mampu lagi menyelami sebuah kebenaran karena keterbatasannya, datanglah wahyu memberikan informasi. Sebaliknya, ketika wahyu menghadapi tantangan dalam merespon realitas kehidupan masyarakat yang kongkrit sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, datanglah akal memberikan bantuan, sehingga antara akal dan wahyu senantiasa terjadi kerja sama secara bersinergis dalam memandu pertumbuhan dan perembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era kontemporer serta di dalam menyusun tatanan kehidupan dunia yang ditegakkan di atas nilai-nilai kemanusiaan universal demi terwujudnya kehidupan masyarakat sejagad (global) yang berkeadilan, sejahtera, aman, tenteram, dinamis, dan kreatif serta berperadaban tinggi dalam eksistensi masing-masing budaya bangsa yang plural.

Kondisi sosial masyarakat dunia dalam gambaran seperti di atas hanya dapat diwujudkan melalui penerimaan serta penerapan konsep hidup pluralitas tersebut. Manusia memang plural dalam berbagai dimensinya, akan tetapi kemanusiaan itu tunggal, dalam arti manusia yang plural itu dapat dipertemukan dalam sifat-sifat kemanusiaannya yang paling luhur. Di situlah letak etis-humanis-spiritualis. Akan tetapi penomena sosial bahkan problem sosial yang melilit dunia dewasa ini adalah semakin kokohnya suasana ketidakadilan global serta semakin merosotnya nilai-nilai luhur kemanusiaan yang universal yang secara politis dikendalikan oleh negara *super power* dan sekutu-sekutunya. Konsep pluralitas ini, hanya bisa efektif jika masyarakat dunia menganut pandangan sosiologi seperti yang kemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa, “manusia karena makhluk yang lemah dalam kehidupan sosial dituntut untuk hidup saling tolong menolong”, bukan sebaliknya bahwa manusia itu laksana serigala terhadap manusia lain. Dengan

²⁵ Beerling dkk., *Inleding tot de Wetenschappen*. Diterjemahkan dengan *Pengantar Filsafat Ilmu* (cet. IV; Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), h. 58 – 66.

²⁶ Al-Qur’an, surah al-Araf (7) ayat 179.

²⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran* (cet. V; Bandung : Mizan, 1998), h. 60.

paham sosiologi seperti ini, negara-negara maju berkewajiban untuk membantu negara-negara terkebelakang. Untuk konkritnya perlu ada komitmen yang kuat antara negara maju dengan negara-negara terkebelakang atau negara berkembang berdasarkan kesepakatan bersama bagaimana bentuk bantuan itu, yang dalam operasionalnya ditentukan sebuah mekanismenya yang jelas berdasarkan kesepakatan tersebut.

B. Faktor-Faktor Tantangan Pluralitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia faktor diartikan sebagai “hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu”.²⁸ Sedangkan tantangan adalah “hal atau obyek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah”.²⁹ Oleh karena itu, faktor-pluralitas di sini diartikan sebagai hal-hal yang menyebabkan dan menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah pluralitas.

Seperti disinggung pada bagian pendahuluan bahwa dalam makalah ini akan dibahas tiga faktor terpenting masalah pluralitas yaitu : paham teologis, ambisi politik, keserakaan ekonomis. Mungkin masih banyak faktor lainnya, akan tetapi pembahasan ini hanya akan terfokus pada tiga faktor ini.

1. Paham Teologis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, paham diartikan antara lain sebagai “pendapat; pikiran; pandangan; aliran”.³⁰ Teologis berarti “berdasar pada teologi atau pengetahuan ketuhanan berdasarkan kepercayaan agama, terutama kitab suci”³¹. Oleh karena itu paham Teologis diartikan sebagai pendapat atau pikiran yang didasarkan pada pengetahuan tentang ketuhanan menurut kepercayaan agama atau berdasarkan kitab suci.

Dari rumusan di atas serta uraian sebelumnya dapat tergambar akar masalahnya yakni pada pendapat atau pikiran sendiri itulah yang bersifat majemuk atau tidak tunggal, sangat tergantung dari sudut mana ia memandang obyek dan juga sejauh mana kapasitas akal menangkap kemudian mempresepsikan realitas obyeknya serta sejauh mana kemampuan analisisnya lalu mengungkapkan kembali sebagai sebuah konsep mengenai obyek tersebut. Cakupan realitas itu sangat luas

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, cet. II, 2002), h. 313.

²⁹ *Ibid.*, h. 1141.

³⁰ *Ibid.*, h. 811.

³¹ *Ibid.*, h. 1177.

dan sangat majemuk, sedang kapasitas akal manusia adalah juga sangat bersifat majemuk dalam menangkap dan mempresepsikan realitas tersebut. Itulah sebabnya sehingga perbedaan pendapat itu adalah memang alami. Dengan perbedaan pendapat itu adalah merupakan salah satu faktor yang menjadikan kehidupan ini bisa tumbuh dan berkembang secara dinamis dan kreatif. Kebenaran mutlak sebenarnya hanyalah milik Tuhan. Kebenaran hasil temuan pikiran manusia adalah relatif sebagaimana relatifnya pemilik pikiran itu sendiri. Firman Tuhan dalam surah Al-Rahman (55) ayat 26 – 27 : “Semua yang ada di bumi akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”.³² Oleh karena pikiran dan pendapat manusia itu sendiri relatif, maka dibutuhkan bimbingan dan petunjuk wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak.

Namun demikian oleh karena wahyu yang sifatnya mutlak itu adalah juga butuh pemahaman melalui pemikiran manusia sehingga permasalahannya belum bisa berhenti sampai di situ. Machasin salah seorang pakar dan guru besar Ilmu Kalam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis sebagai berikut :

“... kalau dipikir-pikir dengan seksama dan jujur, semua agama mengakui adanya yang kudus sementara yang kudus itu tidak dapat ditangkap dan digambarkan dengan jelas. Ibarat orang buta yang menangkap sebagian dari tubuh gajah dan berusaha menggambarkan keseluruhannya, masing-masing agama mengembangkan konsepsi tentang Tuhan dengan penangkapannya.”
Memang orang dapat mengatakan bahwa konsepsi itu didasarkan atas “Firman Tuhan” namun harus diingat bahwa setiap “Firman Tuhan” itu tertuang dalam bahasa tertentu. Bahasa tertentu itu mempunyai aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan pandangan para pemakainya. Misal bahwa Tuhan dalam Al-Qur’an sebagai sosok berpribadi dengan sifat-sifat “kemanusiaan” (seperti “duduk di atas takhta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pembalas Dendam”). Ini “terpaksa” terjadi karena bangsa Arab pada pada waktu Al-Qur’an turun memandang kenyataan dengan pandangan konkrit saja. Penggambaran Tuhan yang abstrak akan sangat sulit dipahami dan menjadi tidak mungkin dengan bahasa yang tersedia. Dengan demikian, seharusnya orang menghilangkan penggambaran agama lain sebagai musuh untuk dapat hidup dalam kemajemukan secara harmonis.³³

Di sini, Machasin pada dasarnya mengakui bahwa walaupun kandungan wahyu itu mutlak akan tetapi bahasa yang digunakan wahyu itu adalah relatif karena bahasa itu buatan manusia, sehingga untuk memahami yang mutlak itu melalui bahasa yang sifatnya relatif adalah memang sulit. Apalagi pemakai bahasa

³² Departemen Agama, RI., *Op Cit* (1979), h. 886.

³³ H. Machasin, “Pluralisme dalam Semangat Kesatuan Transendental”, dalam Th. Sumartana dkk (ed.) *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia* (cet. I; Yogyakarta : Institut DIA/ Interfide, 2001), h. 3.

itu untuk memahami makna yang terkandung dalam bahasa itu juga harus menggunakan pikiran, sedangkan pikiran itu juga relatif seperti uraian di atas. Dengan demikian perbedaan pemahaman dan pendapat terhadap makna wahyu itu sendiri tidak bisa dihindari. Di sinilah antara lain letak akar masalahnya sehingga dikalangan penganut interen umat beragama itu sendiri muncul berbagai mazhab, aliran, maupun paham-paham keagamaan yang plural dan majemuk khususnya dikalangan umat Islam sendiri baik dalam bidang akidah, hukum, maupun tasawuf. Setiap penganut mazhab, aliran, maupun paham keagamaan, masing-masing boleh-boleh saja beranggapan bahwa pemahamannya yang paling tepat. Tetapi dalam mengkaji anggapan-anggapan ini dengan analisis ilmiah untuk menentukan mana yang paling tepat perlu menggunakan seperangkat metodologi.

Namun bagaimanapun, kendala sebuah metodologi dalam kajian-kajian ilmu-ilmu budaya sikap obyektif murni seperti yang ada di dalam ilmu-ilmu kealaman tidak bisa diterapkan sebagaimana alur berpikir epistemologi paradigma positivistis. Oleh karena itu, mau tidak mau dalam bidang ilmu-ilmu budaya tidak bisa mengelakkan paradigma epistemologi yang bersifat “intersubjektif” yang tidak bisa menutupi samasekali kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Dengan demikian sekali lagi ditegaskan bahwa pluralitas pendapat dan paham yang dalam wilayah ilmu-ilmu budaya termasuk pemahaman agama adalah alami dan manusiawi. Karena itu pluralitas pemahaman dalam lingkup intern dan antar umat beragama yang masing-masing memiliki dan meyakini sebuah kitab suci yang sumbernya sama yakni wahyu ataupun yang sumbernya bukan wahyu, adalah wajar sepanjang tidak mengarah kepada perpecahan dan desintegrasi.

Dalam sejarah terlihat bahwa pandangan teologi yang masing-masing dianut dan diyakini oleh para penganutnya adalah persoalan yang sangat tua usianya dan pandangan yang beragam pula,³⁴ yang pada dasarnya dapat dibagi tiga kelompok, yaitu : paham monoteisme, politeisme, dan paham ateisme. Paham monoteisme adalah paham yang berpendapat bahwa Tuhan itu Esa (tunggal). Paham politeisme adalah paham yang berpendapat bahwa Tuhan lebih dari satu (jamak). Paham ateisme adalah paham yang berpendapat bahwa yang dikatakan Tuhan itu tidak ada. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ateisme itu bukan paham teologi. Itu ada benarnya. Tetapi karena topik kajian ini adalah persoalan teologi secara spesifik, sehingga paham ateisme ini di sini dimasukkan juga sebagai salah satu paham teologi. Walaupun boleh juga dianggap bahwa mereka juga sesungguhnya percaya kepada Tuhan, hanya saja pandangan mereka tentang Tuhan adalah benda. Penggagasnya adalah Karel Marx.³⁵ Ini disinggung sepintas, hanya

³⁴ Brian Morris, *Antropologi Agama : Kritik Teori-Teori Agama kontemporer*. Terjemahan Imam Khoiri (Yogyakarta : AK Group, 2003), h. 111 – 112.

³⁵ *Ibid.*, h. 32 – 38.

sekedar untuk menggambarkan secara garis besar pluralitas dalam sudut pandang teologi.

Pada agama-agama monoteisme, walaupun mempunyai sumber yang sama yaitu wahyu dari Tuhan akan tetapi mereka saling mengklaim masing-masing mereka yang benar. Itulah yang dinamakan *truth claim*³⁶ (klaim-klaim kebenaran). Faktor ini sangat mengganggu suasana kehidupan dalam pluralitas agama. Tiga agama monoteis terbesar yakni Islam, Kristen, dan Yahudi masing-masing mengklaim bahwa agamanyalah yang paling benar. Yang dijadikan dasar adalah wahyu yang mereka pegang masing-masing. Kalau Islam masih mengakui bahwa baik agama Kristen maupun agama Yahudi adalah agama nabi-nabi yang oleh Islam diwajibkan untuk mempercayainya, namun baik Kristen maupun Yahudi tidak mempercayai bahwa Muhammad saw adalah seorang nabi. Itu karena dasar mereka adalah klaim kebenaran, bahwa yang benar adalah apa yang mereka percayai itu. Dalam sejarah terlihat bahwa walaupun pada mulanya hubungan antara Kristen dan Islam masih agak baik, yang ditunjukkan oleh Raja Najasi ketika kaum Muslimin berhijrah ke sana, dan juga sikap Nabi terhadap kaum Yahudi di Madinah sebelum mereka mengkhianati Piagam Madinah, tetapi dalam proses selanjutnya dan bahkan sampai sekarang dampak klaim kebenaran ini sering menimbulkan tragedi kemanusiaan, yang mungkin menjadi salah satu dasar kritik dari penganut aliran humanisme.³⁷ Tragedi kematian Khalifah Utsman yang disebabkan oleh peristiwa berdarah yang dilakukan oleh para pemberontak adalah dipicu oleh fitnah yang disebarluaskan sangat fanatik kepada Ali Ibn Abi Thalib. Karena begitu yakinnya Abdullah Ibn di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah Ibn Saba' yang pura-pura masuk Islam dan pura-pura Saba' bahwa hanya keyakinannya sajalah yang benar, sehingga ia berusaha untuk merusak Islam dari dalam dengan pura-pura masuk Islam. Demi mempertahankan kebenaran yang ia yakini, maka ia rela melakukan hal-hal yang tidak benar yaitu sikap munafik, sedangkan seperti itu jangankan orang beragama, bahkan orang tidak beragama pun akan memandangnya sebagai sikap yang tidak baik. Tetapi lagi-lagi dengan klaim kebenaran tersebut, dicarikanlah dalih, baik dari wahyu sendiri ataupun dari akal pikiran agar sikap munafik tersebut mendapatkan justifikasi.

³⁶ M. Amin Abdullah tetap menghargai *Truth Claim* dalam agama (akidah), tetapi itu sifatnya dalam . batin. Lihat M. Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas Historitas* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 49.

³⁷ M. Arkoun menulis bahwa “humanisme Barat berpendapat, “manusia adalah pusat semua penelitian filosofis-ilmiah : penelitian tentang nasib, asal-usul dan perilaku yang tepat atas kecenderungan khasnya. Lihat M. Arkoun, *Essaissen La Pensee Islamique*. Diterjemahkan dengan membedah *Pemikiran Islam* oleh Hidayatullah (cet. I; Bandung : Pustaka, 2000), h. 85. Bandingkan dengan Lorens Bagus, *Op Cit*, h. 295-296

Sama halnya dengan Islam dalam penyebarannya, ada yang berpendapat bahwa itu adalah dengan kekerasan, sebagaimana anggapan orientalis. Namun Harun Nasution menolak anggapan tersebut. Dalam kasus ini harus dibedakan Islam dalam aspek politik dengan aspek agama atau akidahnya. Benar dalam aspek politik dalam perluasan wilayah kekuasaannya mereka menggunakan perang, akan tetapi penganut agama lokal di daerah kekuasaannya yang baru tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka yang masih setia dengan agamanya yang lama diberi kebebasan untuk tetap menjalankan ajaran agamanya.³⁸

Uraian tersebut di atas adalah hanya sekedar menggambarkan sekilas fakta sejarah tentang dampak *truth claim* tersebut. Dan klaim kebenaran itulah yang menyebabkan timbulnya sikap intoleransi baik antar-umat beragama maupun antara intern umat beragama itu sendiri, yang seterusnya akan dapat berakibat kepada konflik bahkan tindak kekerasan dengan alasan teologis. Namun dalam perjalanan sejarah yang panjang menunjukkan tidak selalu demikian. Islam dengan Kristen misalnya yang ditunjukkan oleh fakta Perang Salib. Antara Islam dengan Yahudi misalnya adanya fakta gerakan zionisme yang sampai sekarang menimbulkan konflik dan peristiwa berdarah di luar perikemanusiaan.³⁹ Tetapi dalam *truth claim* itu sebagai permasalahan pluralitas yang paling sentral, adalah juga sangat terkait dengan istilah-istilah tradisional-modernis, ortodoks-rasional (liberal), skriptualis-substansialis, eksklusif-inklusif, dan lain sebagainya. Artinya semakin kuat sikap intoleransinya terhadap pendapat, pandangan, atau paham keagamaan yang dipandang oleh orang atau kelompok lain sebagai sebuah pemahaman yang benar, semakin kurang rasional paham atau pandangan teologi itu. Sebaliknya, semakin rasional, substansial dan inklusif sikap keberagamaan seseorang akan semakin mudahlah pula terjadinya toleransi diantara berbagai pendapat, pandangan tersebut, antara lain dalam pemahaman atau kepercayaan keagamaan yang bersifat majemuk atau plural itu.

Walaupun demikian oleh karena kemampuan akal manusia yang terbatas, sedangkan yang akan diberikan pemahaman adalah wahyu yang sifatnya tak terbatas sebagai kalam Allah, maka pada dataran aplikatif, kurang tepat untuk menggunakan pendekatan rasional dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Dalam kaitan ini Nurcholish Madjid berpendapat bahwa “pluralisme” adalah masalah bagaimana kaum muslimin mengadaptasikan diri dengan dunia modern.⁴⁰ Dalam kerangka adaptasi tersebut perlu dipilah mana persoalan yang sangat prinsipil atau yang menyangkut keakidahan dan mana yang non akidah. Dalam hal-hal yang non akidah terbuka peluang yang luas untuk toleransi dan pembaharuan selama tidak mengganggu prinsip keakidahan.

³⁸ Harun Nasution, *Op Cit*, h. 268

³⁹ Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam : Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (cet. II; Bandung : Mizan, 1999), h. 101.

⁴⁰ *Ibid*, h. 102.

Adapun dalam hal yang menyangkut akidah dalam dunia pluralitas adalah berpegang pada prinsip dasar “*agree and disagreement*”.

Kalau klaim kebenaran yang absolut (mutlak) tetap menjadi pegangan para penganut agama yang berbeda, di era globalisasi dan era informasi yang dewasa ini, tidak bisa diatasi atau diminimalisir, maka kehidupan umat beragama akan selalu terancam oleh ketegangan-ketegangan dan konflik yang berbasis teologis. Karena itu untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan pendekatan filsafat sosial keagamaan, khususnya pendekatan yang oleh C. A. Van Peursen yang disebut dengan istilah *Einfuhlung*, yakni kontak langsung lewat perasaan, bukan semata-mata lewat kognisi dan akal pikiran. Melalui pendekatan ini, seseorang dituntut untuk dapat menghayati dan memahami yang dirasakan oleh orang lain dalam batinnya, sebagaimana yang kita rasakan sendiri jika menghadapi persoalan-persoalan yang serupa. Sebagaimana M. Amin Abdullah tulis bahwa, *Einfuhlung*, *empaty*, dan *vertehen* (memahami) menjadi simpul-simpul syarat pendekatan filsafat sosial keagamaan baru, yang bercorak humanistik pada abad ke-20. Logika yang semata-mata hanya menekankan “kebenaran (*truth*)” tidak lagi menjadi obsesi. *Meaning* (makna), dalam arti pendekatan etis lebih dipentingkan daripada pendekatan logika-teologis. Dengan pendekatan ini, menurut Amin, kontak sosial yang terus-menerus, permasalahan etika, dan bukan semata-mata persoalan logika benar-tidaknya suatu kepercayaan, lebih ditonjolkan. Amin memberikan argumentasi dengan mengemukakan pendapat Fazlurrahman yang menegaskan bahwa “yang sebenarnya dituju oleh Al – Qur’an bukanlah Tuhan, melainkan adalah manusia dan tingkah lakunya”.⁴¹

Dengan begitu walaupun pandang teologi itu sendiri memihak tetapi pendekatannya adalah bersifat netral, artinya tidak menyalahkan dan sekaligus tidak juga membenarkan keyakinan yang dianut oleh orang lain. Namun secara etis semua orang dituntut untuk berlaku etis kepada siapapun juga dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Seiring dengan itu, perlu saling menghargai kepercayaan antar penganut agama atau kepercayaan yang berbeda-beda dengan prinsip *agree and disagreement*. Prinsip ini sesuai juga dengan maksud yang terkandung dalam Al – Qur’an surah Al – Kafirun (109) ayat 6 (lihat futnot no. 11).

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan filsafat rasional yang murni antroposentris dan humanistik, seperti pandangan Ignas Kleden yang berpendapat bahwa “... hampir tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama lainnya. Semua agama memperjuangkan penyelamatan dan keselamatan

⁴¹ M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural : Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer* (cet. I; Bandung : Mizan, 2000), h. 63 – 64.

manusia”.⁴² Akan tetapi soal keaqidahan sebagai kebenaran yang ditangkap oleh akal manusia secara berbeda dibutuhkan saling menghargai atas perbedaan tersebut.

2. Ambisi Politik

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ambisi diartikan sebagai “keinginan atau hasrat yang besar untuk memperoleh atau mencapai sesuatu”⁴³. Sedangkan politik diartikan antara lain adalah “segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara”⁴⁴. Karena itu, ambisi politik dapat diartikan sebagai kemauan besar untuk mencapai sesuatu yakni kekuasaan dalam kaitannya dengan pemerintahan negara.

Di sini muncul pertanyaan apa hubungan politik dengan pluralitas, khusus pluralitas bidang agama ?. Walaupun dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa ini kurang relevan, namun dalam sejarah terlihat bahwa dalam Islam yang inti ajarannya adalah akidah, akan tetapi “persoalan”⁴⁵ yang pertama muncul dalam Islam setelah Nabi wafat adalah masalah politik. Dari persoalan politik itulah munculnya persoalan keakidahan. Karena itu dengan pendekatan normatif adalah benar masalah akidah yang terpenting, tetapi dengan pendekatan historis, maka persoalan politik tidak kurang pentingnya dari masalah akidah, bahkan tidak bisa dipisahkan, antara yang normatifitas dan historisitas, ibarat mata uang koin yang punya dua muka, sama tetapi tidak serupa, kedua mukanya itu yang menunjukkan identitas koin tersebut sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. M. Quraish Shihab berpendapat kekuasaan politik itu pada hakekatnya adalah “sebagian dari kekuasaan yang dianugerahkan Allah dan bagi yang melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip politik, maka ia akan berhasil, tetapi yang tidak sebaliknya akan gagal.”⁴⁶ Karena persoalan politik adalah persoalan yang tidak sakral, maka prinsip-prinsip dalam mengatur dan menjalankan kekuasaan, harus mengacu kepada nilai-nilai etika kemanusiaan universal sesuai tuntutan kemajuan zaman dan sosio-kultural masyarakat dimana kebijakan politik itu akan diterapkan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etis, bukan pendekatan teologis. Namun, dalam historisitas perjalanan sejarah politik, terkadang pendekatan teologis itu yang dominan, sehingga terkadang dengan alasan teologis tersebut digunakan untuk mempertahankan status quo. Seiring dengan itu, untuk mempertahankan

⁴² Sumartana dkk. (ed.), *Op Cit.*, h. 3

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit.*, h. 37.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 886.

⁴⁵ Persoalan yang dimaksudkan di sini adalah yang menyebabkan paham (golongan, aliran) politik maupun teologi sebagai awal munculnya fakta sejarah tentang plural di bidang politik dan teologi dalam Islam.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan*, h.422.

status quo tersebut, penguasa berusaha melanggengkan satu paham saja (anti pluralitas) yaitu paham yang sesuai dengan usaha memperkokoh kekuasaannya. Misalnya saja paham teologi jabariah pernah digunakan oleh khalifah-khalifah Umayyah untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya. Di Indonesia kasus paradigma “asas tunggal partai politik” pada masa pemerintahan orde Baru, juga sebuah contoh penyeragaman di bidang politik, yang tidak sesuai dengan semangat pluralitas. Kasus terakhir ini adalah bermotif ambisi kekuasaan semata-mata.

Kasus semacam ini sejak zaman kolonialisme imperialisme, sampai dewasa ini, masih bercokol di dunia Barat khususnya Amerika Serikat. Pemahaman seperti ini dapat disimak dari tulisan M. Amin Abdullah sebagai berikut :

Jika *truth claim* hanya terbatas pada aspek ontologis-metafisis, barangkali tak perlu dirisaukan. Namun, yang terjadi sebaliknya : *truth claim* memasuki wilayah sosial politik yang praktis-empiris. Studi orientalisme yang mempelajari agama-agama di Timur berujung pada dominasi dan hegemoni Barat terhadap Timur, tulis Edward W. Said. Sedangkan Islam yang memasuki wilayah politik saat ini lebih dianggap sebagai “momok” yang ditakuti Barat, ketimbang sebagai agama yang perlu dihormati karena konsep-konsepnya yang luhur dalam memecahkan kesulitan manusia sekarang.⁴⁷

Hegemoni Barat atas dunia Timur tersebut selain bermotif politik, juga adalah bermotif ekonomi. Di satu sisi negara-negara dunia ketiga (Timur) adalah merupakan pasar buat hasil-hasil industri dunia Barat, dan di sisi lain dunia Timur adalah negara-negara yang sumber daya alamnya kaya raya sementara sumber daya manusianya masih rendah. Ini adalah merupakan peluang bagi dunia Barat untuk mengeksploitasi dunia Timur demi kepentingan ekonomi mereka.

Di bawah ini diuraikan sekilas sekitar masalah ekonomi dalam kaitannya dengan pluralitas.

3. Kecerakahan Ekonomi

Dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa “kecerakahan berarti kelobaan, ketamakan, kerakusan”. Kecerakahan berasal dari kata “cerakah yang berarti selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki”.⁴⁸

Ekonomi diartikan antara lain sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan perindustrian dan perdagangan”.⁴⁹ M. Quraish Shihab mendefinisikan ekonomi

⁴⁷ M. Amin Abdullah, *Studi Agama*., h. 47 – 48.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit.*, h. 1045.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 287.

sebagai “ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya”. Akan tetapi definisi ini belum kena substansinya, karena pertanyaan mengapa belum terjawab. Uang itu dibelanjakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individual maupun kebutuhan bersama (kebutuhan sosial) dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, uang itu selain mempunyai fungsi individual, juga memiliki fungsi sosial, sehingga uang itu lebih baik disimpan di bank daripada disimpan sendiri di rumah jika ada kelebihan kebutuhan sehari-hari, agar fungsi sosialnya berjalan. Sebagian ahli mendefinisikan ekonomi sebagai pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia yang “tidak terbatas” dengan jalan pengolahan dan pengelolaan segenap sumber daya yang terbatas. Ada pula yang berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari agar kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan. Artinya, seluruh warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Tampaknya inilah lebih cocok dengan konsep pluralitas. Kebutuhan anggota masyarakat adalah plural baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Namun, kesemuanya itu terpenuhi sesuai tingkat kebutuhannya masing-masing.

Akan tetapi sistem ekonomi kapitalistis dan sistem ekonomi konglomerasi, kurang sejalan dengan prinsip pluralitas. Dalam kegiatan ekonomi untuk mendapat hasil yang optimal, diterapkan salah satu kebijakan ekonomi di bidang pertanian yang dikenal sebagai Revolusi Hijau. Artinya suatu upaya penyeragaman, namun akan berdampak kepada musnahnya sebagian jenis tumbuh-tumbuhan yang alami yang pada gilirannya akan mengganggu ekosistem yang akan merugikan kehidupan umat manusia.

Dalam uraian ini sasaran pembahasan yang akan digarisbawahi adalah aspek keserakahan ekonomi yang akan berdampak pada kesenjangan ekonomi dalam kehidupan sosial. Dalam kasus global keserakahan ekonomi ini, walaupun negara-negara maju, yang income perkapitanya sudah tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang atau negara miskin, akan tetapi dengan sistem ekonomi kapitalis yang mereka anut, implikasinya adalah orang yang kaya raya akan semakin kaya raya dan orang miskin akan bertambah miskin. Apalagi dengan kebijakan mekanisme pasar akan berdampak pada negara-negara yang miskin atau yang baru berkembang jelas akan jauh kalah bersaing dengan negara-negara maju. Artinya dengan kebijakan seperti ini secara tidak langsung negara-negara miskin akan tertindas oleh negara-negara maju, dan akan sangat sulit keluar dari dominasi ekonomi negara-negara maju tersebut. Sikap dominasi seperti ini adalah bertentangan dengan prinsip pluralitas yang seyogyanya sistem ekonomi global tidak mendominasi sistem ekonomi lokal pada negara-negara dunia ketiga, akan tetapi dengan kebijakan mekanisme pasar sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi kapitalis, mau tidak mau sistem ekonomi lokal akan terpasung dan terbawa arus sistem ekonomi kapitalis. Untuk kasus Indonesia di satu slogan ekonomi kerakyatan senantiasa berdegung, tetapi di sisi lain ketika sistem ekonomi kerakyatan yang bernuansa pluralitas dipasung oleh sistem ekonomi global yang kapitalistis, juga

akan sangat kesulitan. Apalagi sumber daya manusianya yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju.

Kebijakan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan, tetapi di sisi lain mengesampingkan pemerataan, adalah salah satu kelanjutan dari kebijakan ekonomi kapitalis. Pluralitas ekonomi ini harus bebas dari sistem ekonomi kapitalis, sehingga negara-negara dunia ketiga harus membangun kerjasama yang kuat dan berusaha membebaskan diri dari ketergantungan dan dominasi negara-negara maju, agar sistem perekonomiannya sebagai bagian dari sistem budaya lokal dapat bereksistensi dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai kondisi budaya lokal dengan pemberdayaan budaya asing yang sifatnya positif untuk memacu perkembangan ekonomi lokal.

Dari uraian terdahulu dapat dikemukakan bahwa faktor tantangan pluralitas pada aspek teologi dan politik adalah terletak pada *truth claim*, walaupun arahnya berbeda tetapi tampak dalam sejarah Islam terkadang kedua aspek ini pengaruh-mempengaruhi. Pada aspek ini ekonomi yang menonjol selain *truth claim*, yaitu bahwa sistem ekonomi kapitalis yang bersifat menindas dan mengeksploitasi pihak yang lemah ekonominya.

Baik tantangan teologis, politis maupun ekonomis kesemuanya terjalin berkelindan dalam soal pluralitas yang perlu disikapi dan ditangani secara arif dan bijak dalam kegiatan dakwah keagamaan.

4. Etika Dakwah dalam Tantangan Pluralitas

Mengakhiri kajian ini perlu diungkap sekilas tentang etika dakwah dalam tantangan pluralitas yang menekankan aspek metodologis. Dalam al – Qur'an memberikan petunjuk tentang metode dakwah antara lain surah al – Nahl (16) ayat 125 yang terjemahannya sebagai berikut :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk.⁵⁰

Ada tiga metode dalam ayat ini yaitu : hikmah, pelajaran yang baik dan diskusi yang baik. Sebelum membahas lebih lanjut metode ini, di sini perlu dikemukakan lebih dahulu komponen dakwah yang paling tidak ada tujuh komponen, yaitu : 1) Tujuan, 2) Isi pesan, 3) Pembawa pesan, 4) Penerima pesan, 5) Metode, 6) Media, 7) Setting sosial. Ketujuh komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya saja pembawa pesan sekaligus dirinya mengandung metode dan isi pesan. Dengan kata lain dirinya adalah suri teladan yang akan dicontoh oleh penerima pesan. Apalagi komponen tujuan adalah sangat sentral karena itulah sasaran yang ingin diperoleh dalam kegiatan

⁵⁰ Departemen Agama, RI., *Op Cit.*, h. 421.

dakwah. Dalam kaitan dengan dakwah menghadapi tantangan pluralitas, setting sosial termasuk kondisi sosio-kultural penerima pesan perlu mendapat perhatian khusus. Di tengah-tengah masyarakat plural perlu dicermati tingkat heterogenitas masyarakat dalam segala aspek, seterusnya diidentifikasi dengan seksama, lalu dipetakan dengan cermat untuk dapat menyiapkan materinya. Kemudian ditentukan metodenya terakhir menentukan medianya. Isi pesannya diusahakan dengan hasil identifikasi tadi yaitu sejauh kapasitas penerima pesan untuk bisa mempengaruhi melalui pesan yang akan disampaikan.

Di dalam pemetaan ini misalnya saja 1) dari segi jenis kelamin, 2) dari segi usia, 3) dari segi tingkat pendidikan, 4) dari segi pekerjaan atau profesi, 5) dari segi paham keagamaan, 6) dari segi tingkat pendidikan, 7) dari segi ekonomi, 8) dari segi lokasi, desa atau kota, dan lain sebagainya.

Dengan pemetaan yang cermat seperti ini akan dapat ditentukan tujuannya, metodenya, maupun medianya, secara tepat, sehingga akan dapat memperoleh hasil yang efektif. Oleh karena itu maka penerapan dakwah, hendaknya dalam masyarakat plural menggunakan prinsip manajemen. Paling tidak ada empat unsur yang mutlak harus dilakukan, yaitu: *Pertama, planning*, yakni penyusunan rencana kegiatan dakwah. Namun sebelum penyusunan *planning* sebaiknya didahului dengan survei terhadap objek dakwah untuk dapat mendiagnosa secara tepat, ibarat pasien apa penyakit yang perlu diobati agar supaya dapat diberikan obat yang tepat. Demikian halnya materi dakwah harus disesuaikan dengan kebutuhan objek dakwah agar materi dakwah itu dapat diterima dengan baik. *Kedua, organizing*, yakni pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini dakwah dipandang sebagai sistem yang melibatkan komponen paling tidak *man, material and money* untuk diorganisir dalam sebuah sistem dalam upaya pencapaian tujuan dakwah secara efektif dan efisien. *Ketiga, actuating*, yakni pelaksanaan kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah dilakukan berdasarkan sistem administrasi dan manajemen akan memperoleh hasil yang jauh lebih baik daripada kegiatan dakwah yang tidak dimenej dengan baik. *Keempat*, adalah *evaluation*, yakni setelah kegiatan dakwah selesai sesuai yang telah ditetapkan dalam *planning* (perencanaan), maka harus diadakan evaluasi guna untuk perbaikan dalam penyusunan program atau perencanaan selanjutnya.

Dakwah dalam era kontemporer tidak bisa diartikan sempit, tetapi harus mencakup segenap aktifitas untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam kaitan dengan tantangan pluralitas yang beraar pada faktor teologis, ekonomis, dan politik, maka di sinilah letak penting etika dakwah yang berwawasan etika dan berwawasan multikultural. Etika yang dimaksud adalah moral yang didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Landasan moralnya antara lain adalah “jangan engkau memperlakukan orang lain yang jika sekiranya perlakuan itu diperlakukan atas dirimu adalah engkau tidak suka”. Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan, maka tidak boleh ada penindasan di antara sesama manusia, baik yang sifatnya politis, ekonomis dan juga teologis.

Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan etika dakwah di sini yaitu tata cara yang sebaik-baiknya yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan menggunakan pendekatan multidimensional seperti telah diuraikan dalam pembahasan yang terdahulu.

Persoalan teologi, politik dan ekonomi adalah tiga hal yang sangat erat kaitannya dalam konteks tantangan pluralitas, sehingga pendekatan etika dakwah selain pendekatan etis yang humanistik juga pendekatan dakwah struktural adalah penting. Pendekatan tersebut antara lain melalui lembaga-lembaga pendidikan, lembaga politik bahkan melalui semua lembaga yang ada baik pemerintah maupun swasta.

III. PENUTUP (KESIMPULAN)

1. Secara teoritis konsep pluralitas itu adalah beragam. Pluralitas itu mencakup wilayah metafisik maupun fisik. Dalam wilayah metafisik khususnya di bidang akidah keagamaan-pun juga jelas ada pluralitas. Masing-masing diakui eksistensinya sesuai dengan keyakinan para penganutnya, baik pada aspek teologi, politik maupun ekonomi.
2. Tantangan pluralitas yang dominan adalah *truth claim* (klaim kebenaran). Persoalan teologi, politik dan ekonomi adalah tiga faktor yang sangat penting dalam hidup ini yang dalam sejarah terlihat bahwa faktor teologi pernah mendominasi budaya Barat, kemudian faktor politik ekonomi, dunia ketiga pernah didominasi oleh dunia Barat. Bahkan dominasi ini oleh AS, sebagai adikuasa, tampaknya ingin dipertahankan terus hingga dewasa ini. Sikap dominasi tersebut adalah tidak sesuai dengan semangat konsep pluralitas. Cara pemecahannya dalam bidang dakwah adalah antara lain dengan pendekatan etis-humanis di atas prinsip nilai-nilai kemanusiaan universal.

Wallahu Alamu Bissawab

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural : Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer* (cet. I; Bandung : Mizan, 2000).
- _____, *Studi Agama : Normativitas Historitas* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).
- _____, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995).
- Arkoun, M, *Essaissen La Pensee Islamique*. Diterjemahkan dengan membedah *Pemikiran Islam* oleh Hidayatullah (cet. I; Bandung : Pustaka, 2000).
- Asy'ari, Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berfikir* (Yogyakarta : LESFJ, 1999).
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat* (Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000).

- Beerling dkk., *Inleding tot de Wetenschappen*. Diterjemahkan dengan *Pengantar Filsafat Ilmu* (cet. IV; Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997).
- Brian Morris, *Antropologi Agama : Kritik Teori-Teori Agama kontemporer*. Terjemahan Imam Khoiri (Yogyakarta : AK Group, 2003).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, cet. II, 2002).
- Encyclopedi Amerikana, vol. 22 (U.S.A., : t.p., 1992).
- Fazlurrahman, *Major Themes of the Qur'an*. Diterjemahkan dengan Tema-Tema Pokok al-Quran oleh Anas Mahyudin (Bandung : Pustaka, 1996).
- Machasin, H, "Pluralisme dalam Semangat Kesatuan Transendental", dalam Th. Sumartana dkk (ed.) *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia* (cet. I; Yogyakarta : Institut DIA/ Interfide, 2001).
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta : Paramadina, 2004).
- Magnis, Franz – Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, (Yogyakarta : Pustaka, 1991).
- Nasution, Harun, *Islam Rasional* (cet. V; Bandung : Mizan, 1998).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran* (Bandung : Mizan, 1999).
- , *Membumikan al-Quran* (Bandung : Mizan, 1998).
- Tibi, Bassam, *Islam and The Cultural Accomodation of Social Change*. Diterjemahkan dengan *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial* oleh Misbah Zulfah Ellizabet dan Zaenul Abbas (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999).
- Wijoyo, Kunto, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung : Mizan, 2001).
- Woodward, Mark R., (ed.), *Jalan Baru Islam : Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (cet. II; Bandung : Mizan, 1999).